**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018.

Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 Indikator Makro Pembangunan yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2013–2018 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati No 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 64 Tahun 2015 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2016.
    1. **Maksud dan Tujuan**
       1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 adalah sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

* + 1. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 adalah agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan oleh berbagai pihak sehingga dapat mewujudkan sinergitas antar dokumen perencanaan.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | : | Pendahuluan   * 1. Latar Belakang   2. Landasan Hukum   3. Maksud dan Tujuan   4. Sistematika Penulisan |
| BAB II | : | Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2017  2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2013-2018  2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan  2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan  2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD  2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat |
| BAB III | : | Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan  3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan  3.2 Program dan Kegiatan |
| BAB IV | : | Penutup |